



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 168 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 168

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 168 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN BALEENDAH

Jl. ADIPATI KERTAMANAH NO.2 BALEENDAH 40375 TELP/FAX 5940847

Website : <https://kecamatanbaleendah.bandungkab.go.id>

email : kec_baleendah@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BALEENDAH

Nomor : 188.3/027/Prog/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN BALEENDAH TAHUN 2025

CAMAT BALEENDAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun berjalan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Baleendah tahun 2025 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Baleendah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Baleendah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
 24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-Bappelitbangda/2023 tentang Tim Penyusunan Renja Perubahan PD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi:
1. Tim Pengarah,
 2. Ketua,
 3. Sekretaris,
 4. Anggota

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Baleendah

Pada tanggal: 05 Mei 2025



Drs. EEP SYARIF HIDAYATULLAH, M.Si

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 196808241990061001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
(Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Bandung

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BALEENDAH

Nomor : 188.3/027/Prog/2025
Tanggal : 05 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah Ketua Sekretaris Anggota	: Camat Baleendah : Sekretaris Kecamatan : Kasubbag Program dan Keuangan : Kasubbag Umum Kepegawaian : Kasi Sosial Budaya : Kasi Pemberdayaan Masyarakat : Kasi Pemerintahan : Kasi Pembangunan : Kasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban


CAMAT BALEENDAH
Drs. EFF SYARIF HIDAYATULLAH, M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 196808241990061001



Rencana Kerja Perubahan **Kecamatan Baleendah** **Tahun 2025**

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung

KATA PENGANTAR

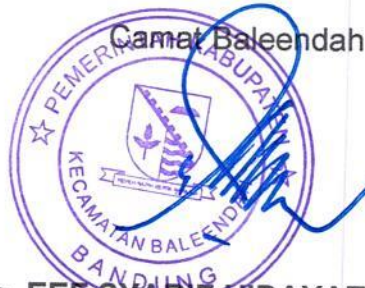
Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan pemerintah daerah, Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun meskipun belum dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2025 namun demikian Rencana Kerja Perubahan ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konprehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Baleendah.

Bahwa Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Baleendah sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visidan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.

Semoga Rencana Kerja Perubahan ini berguna bagi Kecamatan Baleendah dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten Bandung.

Baleendah, Juni 2025



Drs. EEF SYARIF HIDAYATULLAH, M.Si

NIP. 19680824 199006 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Landasan Hukum	3
2.3 Maksud dan Tujuan	6
2.4 Mekanisme Penyusunan.....	6
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALEENDAH TAHUN LALU	8
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun Lalu Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Baleendah berikut kami sajikan data secara umum.....	8
2.1.1 Kondisi Eksisting Kecamatan Baleendah.....	8
2.1.2 Struktur Organisasi.....	9
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.1.4 Sumber Daya Aparatur	10
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	19
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah	26
2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.....	29
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.6 Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan	34
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III	47
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan	50
3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB IV	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V	84
PENUTUP	84

BAB I PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Renja Perubahan merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Ranhir tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi yang secara melekat dan diberikan berdasarkan Undang – undang (kewenangan Atributif) dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan (Kewenangan Delegatif), Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi camat yang sekaligus merupakan tugas dan

fungsi Kecamatan diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang secara substansi meliputi adanya Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan adanya Target yang akan dicapai sebagai acuan dalam pengukuran kinerja sehingga memberikan gambaran terhadap capaian kinerja untuk setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari Perencanaan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdiri dari 27 bidang kewenangan dan 54 Sub bidang Kewenangan serta 156 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan. Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat penting dalam perencanaan. Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Baleendah Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai meskipun secara substansi mengalami kendala dikarenakan belum tersusunya Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75);

2.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1(satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunanyang berkelanjutan di Kecamatan Baleendah

2.4 Mekanisme Penyusunan

1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan KecamatanBaleendah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perubahan Kecamatan Baleendah, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah, keterkaitan antara Renja Perubahan dengan dokumenRKPD, Renstra dengan Renja Perubahan

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Baleendah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baleendah
- 2.4 Review Terhadap Renja Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baleendah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

5. BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALEENDAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Baleendah Tahun Lalu Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Baleendah berikut kami sajikan data secara umum.

2.1.1 Kondisi Eksisting Kecamatan Baleendah

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 3417,60 ha, secara administrasi dibagi ke dalam 8 wilayah desa dan kelurahan, dimana Desa Malakasari merupakan desa dengan wilayah terkecil yaitu seluas 1,576 ha atau hanya 5% dari luas wilayah Kecamatan Baleendah, sedangkan Kelurahan Jelekong dengan luas 6,94 ha atau 20% dari luas Kecamatan Baleendah.

Secara Astronomis Kecamatan Baleendah terletak pada $7^{\circ}13' - 7^{\circ}71'$ dan $107^{\circ}31' - 107^{\circ}40'$ BT, sedangkan secara geografis Kecamatan Baleendah berada ditengah wilayah Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan 5 Kecamatan lain yang masih merupakan wilayah administratif Kabupaten Bandung dengan ketinggian wilayah berada pada 600 m sampai 715 m diatas permukaan laut sebagian besar wilayahnya merupakan dataran dan perbukitan dengan suhu udara berkisar antara $24^{\circ} - 32^{\circ}$ C. wilayah Kecamatan Baleendah dilalui oleh 2 (dua) sungai yaitu sungai Citarum dan sungai Cisangkuy.

Kecamatan Baleendah berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain, diantaranya:

Sebelah Selatan	: Kecamatan Pameungpeuk
Sebelah Utara	: Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang
Sebelah Timur	: Kecamatan Ciparay
Sebelah Barat	: Kecamatan Katapang

Pada level pemerintahan desa/ kelurahan satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil adalah Rukun Tetangga (RT) yang dibawah oleh Rukun Warga (RW). Kecamatan Baleendah memiliki jumlah SLS sebanyak 995 RT dan 148 RW, Berdasarkan pembagian wilayah administratif terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 5 (lima) Kelurahan yaitu :

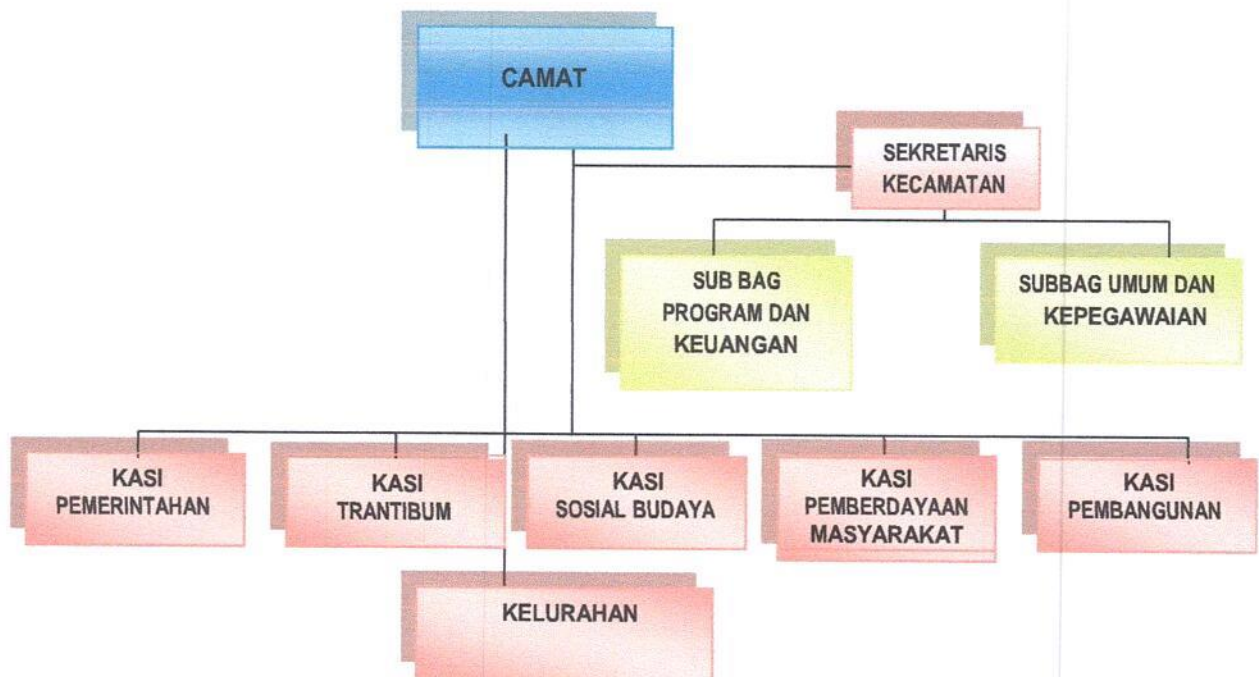
1. Kelurahan Andir
2. Kelurahan Baleendah
3. Kelurahan Manggahang
4. Kelurahan Jelekong
5. Kelurahan Wargamekar
6. Desa Malakasari
7. Desa Bojongmalaka
8. Desa Rancamanyar

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - a. Sub. Bagian Program dan keuangan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Jabatan Fungsional Kecamatan
9. Lurah
10. Sekretaris Kelurahan
11. Kasi Pemerintahan Kelurahan
12. Kasi Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan, dan
13. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan
14. Jabatan Fungsional (Arsiparis)

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Pemerintahan Kecamatan Baleendah
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 120 tahun 2023)



2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

2.1.4 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya aparatur Kecamatan Baleendah pada pertengahan tahun 2024 terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 (tiga puluh satu) orang Non PNS, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur

No	Pangkat	Golongan	Eselon	Jumlah
1.	Pembina TK. 1	IV b	III a	1
2.	Pembina	IV a	III b	1
3.	Pembina	IV a	IV a	2
4.	Penata TK. 1	III d	IV a	3
5.	Penata TK. 1	III d	IV b	8
6.	Penata	III c	IV a	2
7.	Penata	III c	IV b	4
8.	Penata Muda TK 1	III b	IV b	2
9.	Penata Muda TK. 1	III b	IV b	3
10	Penata Muda TK. 1	III b	JFU	2
11	Penata Muda	III a	IV b	5
12.	Penata Muda	III a	JFU	0
11.	Pengatur TK I	II d	JFU	12
13.	Pengatur	II c	JFU	10
14.	Pengatur Muda TK I	II b	JFU	1
15.	Pengatur Muda	II a	JFU	0
16	Non PNS			31
Jumlah				87

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Pejabat Struktural eselon III a, yaitu Camat
- 1 (satu) orang Pejabat Plt Sekretaris Kecamatan.
- 8 (Delapan) orang Pejabat Struktural eselon IV a, yaitu Lurah 5 (lima) Kelurahan, KepalaSeksi Pemerintahan Kecamatan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, Kepala Seksi Sosial Budaya, Kepala Seksi Pemberdayaan MasyarakatKecamatan.
- 18 (delapan belas) orang Pejabat Struktural eselon IV b, yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan, dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan.
- 27 (dua puluh tujuh) Pejabat Pelaksana tertentu, yaitu Bendahara Pengeluaran Kecamatan, Bendahara Pengeluaran Kelurahan, Pengurus Barang, Penata Laporan Keuangan, Pengelola Administrasi Kepegawaian, Pengelola Dokumentasi Informasi

Publik, Pengelola Keuangan Desa

6. 16 (enam belas) orang Pelaksana administrasi.

Untuk membantu Pelaksanaan tugas Kecamatan Baleendah mempunyai Tenaga outsourcing Pelaksana Keamanan dan 31 (Tiga puluh satu) orang tenaga administrasi perkantoran.

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan SKPD Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur.

Realisasi Pencapaian Target Kinerja di Lingkungan Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024

	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	16,225,838,957.00	6,180,759,182.00	38.09%	Poin	71	70.15	98.80%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	41,410,887.00	1,950,000.00	4.71%	%	100	100	100.00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,610,887.00	-	0.00%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,350,000.00	-	0.00%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,350,000.00	-	0.00%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,700,000.00	975,000.00	14.55%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5,350,000.00	-	0.00%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,350,000.00	-	0.00%	Laporan	1	1	100.00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,700,000.00	975,000.00	20.74%	Laporan	3	0	0.00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12,332,334,202.00	6,164,474,182.00	49.99%	%	100	100	100.00%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,323,584,202.00	6,164,474,182.00	50.02%	Orang/bulan	12	6	50.00%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,700,000.00	-	0.00%	Laporan	4	0	0.00%

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,050,000.00	-	0.00%	Laporan	4	2	50.00%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	-	-	0.00%	%	0	0	0.00%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	87,000,000.00	-	0.00%	%	0	0	0.00%
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	0.00%	0	0	0	0.00%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87,000,000.00	-	0.00%	Paket	0	0	0.00%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0.00%	0	0	0	0.00%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00%	0	0	0	0.00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	528,691,068.00	125,317,100.00	23.70%	%	100	100	100.00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30,000,000.00	15,000,000.00	50.00%	Paket	12	6	50.00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	394,238,800.00	81,978,500.00	20.79%	Paket	4	2	50.00%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26,178,000.00	8,135,000.00	31.08%	Paket	4	2	50.00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,115,000.00	13,592,000.00	54.12%	Paket	17	9	52.94%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22,952,900.00	411,600.00	1.79%	Paket	2	1	50.00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000.00	6,200,000.00	31.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,206,368.00	-	0.00%	Laporan	12	6	50.00%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0.00%	0	0	0	0.00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0.00%	0	0	0	0.00%

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,319,054,800.00		0.00%	%	0	0	0.00%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,236,592,000.00		0.00%	Unit	0	0	0.00%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82,462,800.00		0.00%	Unit	0	0	0.00%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0.00%	Unit	0	0	0.00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,295,148,000.00	507,125,943.00	39.16%	%	100	100	100.00%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	133,188,000.00	31,379,713.00	23.56%	Laporan	12	6	50.00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,161,960,000.00	475,746,230.00	40.94%	Laporan	36	15	41.67%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	622,200,000.00	124,144,970.00	19.95%	%	100	100	100.00%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37,200,000.00	11,691,300.00	31.43%	Unit	17	10	58.82%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35,000,000.00	14,000,100.00	40.00%	Unit	0	0	0.00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	350,000,000.00	98,453,570.00	28.13%	Unit	2	1	50.00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200,000,000.00	-	0.00%	Unit	0	0	0.00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	286,994,120.00	79,474,400.00	27.69%	point	79	81.12	102.68%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	11,410,140.00	-	0.00%	%	0	0	0.00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11,410,140.00		0.00%	Laporan	0	0	0.00%

7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	14,670,180.00	-	0.00%	%	0	0	0.00%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14,670,180.00		0.00%	Dokumen	1	1	100.00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	260,913,800.00	79,474,400.00	30.46%	%	0	0	0.00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	260,913,800.00	79,474,400.00	30.46%	Laporan	1	1	100.00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	13,845,513,988.00	86,633,400.00	0.63%	%	100	100	100.00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	130,401,600.00	23,279,200.00	17.85%	%	100	100	100.00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55,886,400.00		0.00%	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	100.00%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74,515,200.00	23,279,200.00	31.24%	Laporan	1	1	100.00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13,608,928,228.00		0.00%	%	100	100	100.00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	290,642,000.00	-	0.00%	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	100.00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5,631,670,294.00	-	0.00%	Unit	5	5	100.00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,686,615,934.00	1,446,813,750.00	18.82%	Pokmas	25	25	100.00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	64,269,360.00	63,354,200.00	98.58%	%	100	100	100.00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	51,946,000.00	#DIV/0!	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	100.00%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52,859,220.00	11,408,200.00	21.58%	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	100.00%

7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11,410,140.00	-	0.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,410,140.00	-	0.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terfasilitasi	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terfasilitasi	41,914,800.00		0.00%	%	100	100	100.00%
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23,286,000.00		0.00%	Keluarga	0	0	0.00%
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	18,628,800.00		0.00%	Keluarga	0	0	0.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	72,552,280.00	11,275,000.00	15.54%	%	100	100	100.00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61,142,140.00	-	0.00%	%	100	100	100.00%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,410,140.00		0.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	49,732,000.00		0.00%	Laporan	0	0	0.00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,410,140.00	11,275,000.00	98.82%	%	100	100	100.00%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11,410,140.00	11,275,000.00	98.82%	Laporan	1	1	100.00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	163,854,000.00	41,296,001.00	25.20%	%	100	100	100.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	163,854,000.00	41,296,001.00	25.20%	%	100	100	100.00%

7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65,000,000.00	9,980,001.00	15.35%	Orang	300	100	33.33%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65,961,000.00	23,816,000.00	36.11%	Orang	200	200	100.00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32,893,000.00	7,500,000.00	22.80%	Dokumen	2	1	50.00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	109,157,420.00	65,776,200.00	60.26%	%	0	0	0.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	109,157,420.00	65,776,200.00	60.26%	%	0	0	0.00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	43,312,400.00	-	0.00%	Dokumen	3	3	100.00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20,957,400.00	20,923,200.00	99.84%	Dokumen	3	3	100.00%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	44,887,620.00	44,853,000.00	99.92%	Dokumen	3	3	100.00%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2024 masih terdapat hambatan tidak tercapainya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, realisasinya masih rendah, karena Kurangnya disiplin pegawai saat melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan penelitian RKA, sehingga banyak pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak/tanpa membawa surat/dokumen.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Sub kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana prasarana, terutama yang termasuk program unggulan PSPKB realisasi anggaran masih belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Alasannya adalah Sebagian besar pelaksanaannya ada di anggaran kas semester 2.

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Realisasi Program, Kegiatan dan subkegiatan secara keseluruhan sudah mencapai/memenuhi target sesuai capaian outputnya.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana & Prasarana di Kelurahan (dari program Dana Alokasi Umum Sumber Dana APBN), dimana realisasi kegiatan melampaui target, hal tersebut dikarenakan adanya swadaya masyarakat yang luar biasa terutama pada pembangunan sarana prasarannya.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Capaian Kinerja di Kecamatan Baleendah yang secara keseluruhan mencapai mendekati 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- a. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik (terutama operator terkait SKM secara online)
- b. Perubahan Kebijakan/Aturan

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Baleendah

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Baleendah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Kec. Baleendah	Poin	73	Poin	68	Poin	71	Poin	70.15	Poin	99%	72	Poin	70.05	Poin		
1	2																	11=(10/4)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baleendah																96%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah																100%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.02.08	Penyenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah																140%	
7.01.01.2.02.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah																50%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah																100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baleendah																168%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Baleendah																80%	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Baleendah																70%	

7.01.01.2.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	100	%		0	%	0	0	0	0	%		0	0	0%	100	%	100	%	100
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Baleendah	1	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	1	Laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	100	%		0	%	0	0	0	0	%		0	0	0%	100	%	100	%	100%
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Baleendah	0			0		0	0	0	0			0	0	0%	0		0	0	0%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Baleendah	1	Paket		134	Stell	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	0	Paket	134	Paket	13400%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Baleendah	0			0		0	0	0	0			0	0	0%	0		0	0	0%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Baleendah	0			0		0	0	0	0			0	0	0%	57	Orang	57	Orang	#DIV/0!
7.01.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	100	%		100	%	100	100	100	100	%		100	100	100%	100	%	100	%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	Kec. Baleendah	100	Paket		56	Paket	12	Paket	6	Paket	6	Paket	6	Paket	50%	20	Paket	82	Paket	82%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Kantor	Kec. Baleendah	150	Paket		87	Paket	4	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	50%	30	Paket	119	Paket	79%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baleendah	60	Paket		47	Paket	4	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	50%	12	Paket	61	Paket	102%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baleendah	1759	Paket		1012	Paket	17	Paket	9	Paket	9	Paket	9	Paket	53%	26	Paket	1047	Paket	60%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Baleendah	25	Paket		15	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	50%	5	Paket	21	Paket	84%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Baleendah	4	Laporan		2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	3	Laporan	75%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baleendah	163	Laporan		36	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	50%	12	Laporan	54	Laporan	33%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Baleendah	-					0	0	0	0			0	0	0%			0	0	0%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Baleendah	-					0	0	0	0			0	0	0%			0	0	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	100	%		100	%	0	0	0	0	%		0	0	0%	100	%	66.67	%	67%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	2	Unit		0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	50%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Baleendah	10	Unit		1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	2	Unit	20%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	4	Unit		2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	2	Unit	50%
7.01.01.2.08	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	100	%		100	%	100	100	100	100	%		100	100	100%	100	%	100	%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baleendah	60	Laporan		30	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	50%	12	Laporan	48	Laporan	80%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baleendah	180	Laporan		80	Laporan	36	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	42%	31	Laporan	126	Laporan	70%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	100	%		100	%	100	100	100	100	%		100	100	100%	100	%	100	%	100%

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya	Kec. Baleendah	65	Unit	45	Unit	17	Unit	10	Unit	59%	18	Unit	73	Unit	112%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peraltan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	6	Unit	50	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	7	Unit	57	Unit	950%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	6	Unit	3	Unit	2	Unit	1	Unit	50%	1	Unit	5	Unit	83%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	50%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baleendah	79	poln	78	poln	79	Poln	81.12	poln	103%	73	poln	77.37	poln	98%
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	33.33	%	33%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%		Laporan	0	Laporan	0%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	33.33	%	33%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	40%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditolmpahkan kepada Camat	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	33.33	%	33%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditolmpahkan	Kec. Baleendah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Baleendah	10	Lembaga Kemasyarakatan	2	Kegiatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	100%	2	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	50%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	50	Laporan	14	Kegiatan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	16	Laporan	32%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	100	Lembaga Kemasyarakatan	10	Lembaga Kemasyarakatan	10	Lembaga Kemasyarakatan	10	Lembaga Kemasyarakatan	100%	10	Lembaga Kemasyarakatan	30	Lembaga Kemasyarakatan	30%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	25	Unit	5	Kelurahan	5	Unit	5	Unit	100%	20	Unit	30	Unit	120%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	60	Pokmas	62	Kegiatan	25	Pokmas	25	Pokmas	100%	10	Pokmas	97	Pokmas	162%

7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	5	Laporan	5	Laporan	50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	100	%	100	100	%	66.67	%	67%
7.01.03.2.03.01	Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	2	Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	100%	0	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	36	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	100%	2	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	17%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baleendah	8	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	2	Laporan	4	Laporan	50%
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baleendah	8	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	2	Laporan	4	Laporan	50%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Baleendah	100	%	0	%	100	%	100	%	100%	100	%	66.67	%	67%
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Baleendah	40	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%	10	Keluarga	10	Keluarga	25%
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Baleendah	40	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%	10	Keluarga	10	Keluarga	25%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	10%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Baleendah	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	10%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Baleendah	10	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	8	Laporan	80%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100%

7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Baleendah	1203	Orang	336	Kegiatan	300	Orang	100	Orang	33%	300	Orang	736	Orang	61%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Baleendah	400	Orang	200	Orang	200	Orang	200	Orang	100%	100	Orang	500	Orang	125%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Baleendah	10	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50%	2	Dokumen	3	Dokumen	30%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	33.33	%	33%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	33.33	%	33%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	9	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	6	Dokumen	67%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baleendah	9	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	6	Dokumen	67%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Baleendah	29	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	28%

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Baleendah sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi kesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja, sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan.

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Baleendah merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai **Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah.**

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan BaleendahKabupaten Bandung

No.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATANANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
	Meningkatnya Kualitaspelayanan publik	80	Nilai IKM	73	75	78	79	81,74	81,51	83	84	Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik dalam level structural maupun level pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Baleendah. Disamping itu pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan dari seluruh elemen dalam mendaklartuji keluhan dan aspirasi masyarakat, serta adanya personil/SDM yang khusus menangani SKM.
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatan	95	Nilai AKIP	72	72	73	73	75,30	78,50	73	80	Pencapaian ini merupakan hasil dari Kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sectoral maupun pada bidang kesekretariatian . Namun berdasarkan hasil LHE SAKIP Inspektorat , Kecamatan Baleendah masih ada kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu masih ada perbaikan dalam laporan kinerja agar sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dan agar menggunakan bantuan Teknologi Informasi/ TI (Aplikasi).

2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Baleendah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Baleendah telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

2. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan;

- a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Baleendah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
 1. Perizinan
 2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
 3. Melaksanakan Program Kewilayahan
 4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
 5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online.

3. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

1. Permasalahan

- b. Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketepatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
- c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan.
- d. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik secara digital di Kecamatan
- e. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan

- f. Permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik
- g. Adanya kegiatan Galian C quari tanah
- h. Sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainnya) masih belum memadai.

2.Hambatan :

- a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
- b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang belum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.
- c. Belum tersusunnya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan secara optimal

4. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan. Oleh karena itu, melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan dalam segala hal.

5. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

A. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan anggaran
- 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
- 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
- 4) Sinergitas dan solidaritas aparatur

B. Kelemahan

- 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru
- 2) Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap
- 3) Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan disesuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan
- 4) Belum adanya sarana publik yang memadai (RTH) .

C. Tantangan

- 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
- 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
- 4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)

D. Peluang

- 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Antusiasme masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
- 3) Koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan masih terjalin dengan baik.

6. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikutsertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab.
- 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur.
- 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
- 4) Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang.
- 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.
- 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayanan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan.

2.5Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja Perubahan di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Perbedaan Nilai Pagu Rancangan Akhir Dengan Hasil AnalisisPada Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	Ranwal	Hasil Analisis Kebutuhan	Alasan Perbedaan Pagu Indikatif
	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,802,757,618.00	15,399,865,832.00	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>49,000,000.00</i>	<i>54,000,000.00</i>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,000,000.00	8,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,000,000.00	9,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,000,000.00	10,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,500,000.00	1,500,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,500,000.00	1,500,000.00	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12,021,043,668.00</i>	<i>13,419,502,162.00</i>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,009,043,668.00	13,407,502,162.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>4,640,800.00</i>	<i>4,640,800.00</i>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4,640,800.00	4,640,800.00	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	377,531,990.00	445,208,790.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	20,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287,301,990.00	318,778,790.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	19,925,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,250,000.00	27,525,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	30,000,000.00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,980,000.00	18,980,000.00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,955,120.00	46,592,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,592,000.00	36,592,000.00	
Pengadaan Mebel	4,363,120.00	10,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,176,886,040.00	1,267,877,080.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,717,080.00	139,717,080.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,037,168,960.00	1,128,160,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,700,000.00	162,045,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,700,000.00	83,145,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	28,900,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	217,050,000.00	211,200,000.00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7,050,000.00	16,495,300.00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7,050,000.00	16,495,300.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	210,000,000.00	194,704,700.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	210,000,000.00	194,704,700.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,966,401,800.00	14,629,924,284.00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29,107,500.00	79,107,500.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17,464,500.00	17,464,500.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11,643,000.00	61,643,000.00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14,895,201,000.00	14,503,080,484.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	245,288,271.00	245,288,271.00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6,194,837,323.00	6,480,257,197.00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8,449,075,406.00	7,771,535,016.00	
Evaluasi Kelurahan	6,000,000.00	6,000,000.00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30,271,800.00	30,271,800.00	

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	18,628,800.00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11,643,000.00	11,643,000.00	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11,643,000.00	11,643,000.00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	11,821,500.00	17,464,500.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6,000,000.00	11,643,000.00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5,821,500.00	5,821,500.00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33,286,000.00	33,286,000.00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21,643,000.00	21,643,000.00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11,643,000.00	11,643,000.00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,643,000.00	11,643,000.00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11,643,000.00	11,643,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88,286,000.00	88,286,000.00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88,286,000.00	88,286,000.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45,000,000.00	45,000,000.00	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23,286,000.00	23,286,000.00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20,000,000.00	20,000,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47,336,250.00	47,336,250.00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47,336,250.00	47,336,250.00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	27,336,250.00	27,336,250.00	

2.6 Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

Tabel 2.4 (TC 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024Kabupaten Bandung

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baleendah	Nilai AKIP	72 Poin	15,270,081,112.56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baleendah	Nilai AKIP	72 Poin	15,141,388,510.56	
7.1.1.2.01.	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	45,830,000.00	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	49,000,000.00	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,740,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,350,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,000,000.00	
7.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	

7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,740,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000.00
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8,000,000.00
7.1.1.2.01.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah			1,500,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah		0	1,500,000.00
7.1.1.2.01.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah			1,500,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah		0	1,500,000.00
7.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	13,407,502,162.56	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	12,712,329,580.56
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	13,395,502,162.56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	12,700,329,560.56
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6,000,000.00
7.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	6,000,000.00
7.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4,640,800.00	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4,640,800.00
7.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	4,640,800.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	4,640,800.00
7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	429,468,790.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	545,531,990.00

7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20,000,000.00
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	318,778,790.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	437,301,990.00
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,925,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10,000,000.00
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	29,250,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	29,250,000.00
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,000,000.00
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,515,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18,980,000.00
7.1.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baleendah	Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40,955,120.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Baleendah	Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	490,955,120.00
7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	36,592,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	36,592,000.00
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4,363,120.00	Pengadaan Mebel	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	454,363,120.00
7.1.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,179,639,240.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,176,886,040.00
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88,966,215.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,717,080.00
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	1,090,673,025.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	1,037,168,960.00

7.1.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	162,045,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	162,045,000.00
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	83,145,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	83,145,000.00
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28,900,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28,900,000.00
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	40,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	40,000,000.00
7.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	10,000,000.00
7.1.2..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baleendah	Nilai IKM	75 poin	211,200,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baleendah	Nilai IKM	75 poin	211,200,000.00
7.1.2.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	16,495,300.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	16,495,300.00
7.1.2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	16,495,300.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	16,495,300.00
7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baleendah	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	194,704,700.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baleendah	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	194,704,700.00
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Dokumen	194,704,700.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Dokumen	194,704,700.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	150,486,800.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	150,486,800.00

7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79,107,500.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79,107,500.00	
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	17,464,500.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	17,464,500.00	
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	61,643,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	61,643,000.00	
7.1.3.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	41,914,800.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	41,914,800.00	
7.1.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	
7.1.3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11,643,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11,643,000.00	
7.1.3.2.03.5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	11,643,000.00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	11,643,000.00	
7.1.3.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	29,464,500.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	29,464,500.00	
7.1.3.2.06.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Baleendah		10 Keluarga	6,000,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Baleendah		10 Keluarga	6,000,000.00	
7.1.3.2.06.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	11,643,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	11,643,000.00	
7.1.3.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	6,000,000.00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	6,000,000.00	

7.1.3.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	5,821,500.00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	5,821,500.00
7.1.4.1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertiban umum	100%	33,286,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketertiban umum	100%	33,286,000.00
7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	21,643,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	21,643,000.00
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11,643,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,000,000.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,000,000.00
7.1.4.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	11,643,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	11,643,000.00
7.1.4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11,643,000.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.5.1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	100%	88,286,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	100%	88,286,000.00
7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	88,286,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	88,286,000.00

7.1.5.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	45,000,000.00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	45,000,000.00	
7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	23,286,000.00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	23,286,000.00	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20,000,000.00	
7.1.6..	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	47,336,250.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baleendah	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	47,336,250.00	
7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100%	47,336,250.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Desa yang dibina	100%	47,336,250.00	
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	
7.1.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	27,336,250.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	27,336,250.00	
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,249,438,226.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,249,438,226.00	
7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,249,438,226.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,249,438,226.00	

7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33,565,747.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33,565,747.00
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	864,570,779.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	864,570,779.00
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	1,350,101,700.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	1,350,101,700.00
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	1,200,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,659,903,759.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,659,903,759.00
7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,659,903,759.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,659,903,759.00
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	69,713,514.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	69,713,514.00
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,581,906,653.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,581,906,653.00
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	2,007,083,592.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	2,007,083,592.00
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	1,200,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,448,488,560.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,448,488,560.00
7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,448,488,560.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,448,488,560.00

7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	38,729,730.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	38,729,730.00
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,129,390,906.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,129,390,906.00
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,279,167,924.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,279,167,924.00
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	1 Laporan	1,200,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	0	1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,306,042,827.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,306,042,827.00
7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,306,042,827.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,306,042,827.00
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	61,967,568.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	61,967,568.00
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1,423,169,959.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1,423,169,959.00
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	1,819,705,300.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	1,819,705,300.00
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	1 Laporan	1,200,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	0	1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,748,128,812.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,748,128,812.00
7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,748,128,812.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,748,128,812.00

7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	41,311,712.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	41,311,712.00	
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1,390,140,600.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1,390,140,600.00	
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1,315,476,500.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1,315,476,500.00	
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00	

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa/Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbangdi tingkat Kabupaten.

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa/Kelurahan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa/Kelurahan yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan.

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Adapun usulan Musrenbang sebagai berikut

- | | |
|--|--------------|
| 1. Usulan Seluruh Desa /Kelurahan(DSP) | : 535 Usulan |
| 2. Usulan Kecamatan | : 535 Usulan |
| 3. Usulan Yang Ditelaah | : 300 Usulan |
| 4. Usulan yang dilanjutkan | : 253 Usulan |
| 5. Usulan Yang ditolak (tidak dilanjutkan) | : 282 Usulan |

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja Perubahan tetapi usulan dari Desa/Kelurahan di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan diusulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja Perubahan Dinas teknis atau tidak dibiayaidari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Perubahan Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa/Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upayamengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Dukungan Program perangkat daerah (Kecamatan) Yang mendukung terhadapprioritas pembangunan kabupaten dan prioritas nasional

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Baleendah)
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Mempercepat pengurangan kemiskinan	Program jaminan sosial masyarakat	
		Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	
	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Baleendah)
		Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Program Pendidikan Menengah
	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)	
	Meningkatkan tata kelola layanan dasar	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		Program penanggulangan banjir	
		Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Meningkatkan konektivitas	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	
	Mengembangkan telekomunikasi dan informatika		
	Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi		
	Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan		
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	
		Program optimalisasi jaringan irigasi	
	Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	
		Program peningkatan efektivitas investasi	

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Baleendah)	
	Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan	Program pengembangan dan jasa yang kompetitif		
		Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah		
	Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal		
	Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan			
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Meningkatkan produksi energi primer			
	Meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi			
	Meningkatkan aksesibilitas air			
	Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik			
	Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri	Program pemantapan kemandirian pangan		
	Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan			
	Memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat			
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi			

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Baleendah)
	Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air	Program konservasi sumber daya alam	
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata		
	Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS		
	Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatkan kesadaran sumberdaya air		
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	Menjamin kesuksesan pemilu		Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
	Memperkuat pertahanan wilayah nasional		
	Meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Memperkuat efektivitas diplomasi	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program peningkatan disiplin aparatur
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Baleendah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi Kecamatan Baleendah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Baleendah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Kecamatan Baleendah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga

berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yang hendak dicapai adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka memberikan Kontribusi terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029, Tim Perumus Renstra Kecamatan Baleendah telah merumuskan Motto Kecamatan Baleendah yaitu SPIRIT BEDAS “BALEENDAH JAYA” dengan filosofi semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) pelayanan kecamatan Baleendah memiliki motto “BALEENDAH JAYA” yang merupakan komitmen pegawai Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Bangkit” merefleksikan semangat juang dan kemandirian pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan. “Inspiratif” menggambarkan sikap pegawai yang mampu memotivasi masyarakat dan menjadi contoh dalam bersikap. “Sejahtera” menunjukkan upaya pegawai untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pelayanan yang efektif dan efisien. Sementara “Agamis” mencerminkan nilai-nilai spiritual yang melandasi seluruh tindakan pegawai dalam melayani masyarakat. Dengan berpedoman pada motto ini, diharapkan pegawai Kecamatan Baleendah dapat memberikan pelayanan yang prima, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Baleendah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2030.

Target Kinerja Kecamatan Baleendah Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		60,00 Poin	61,50 Poin	63,00 Poin	64,50 Poin	66,00 Poin	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		82,00 Poin	82,25 Poin	82,50 Poin	82,75 Poin	83,00 Poin	

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung yang sampai saat penyusunan Ranhir Renja Perubahan ini belum terumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bandung dari Bupati Baru.

Dengan Misi yang akan diemban OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/SubKegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Baleendah.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah dalam perencanaan Tahun 2024 akan melaksanakan 6 Program, 18 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

Kesesuaian Rencana Kerja Perubahan dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2024 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparaturnya Kecamatan Baleendah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Baleendah pada Tahun 2022 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staf harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baleendah	Nilai AKIP	72 Poin	15,270,081,112.56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Baleendah	Nilai AKIP	72 Poin	15,141,388,510.56	
7.1.1.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	45,830,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	49,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,740,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,350,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000.00	
7.1.1.2.0 1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,740,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000.00	

7.1.1.2.0 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8,000,000.00
7.1.1.2.0 1.8	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah			1,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah		0	1,500,000.00
7.1.1.2.0 1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah			1,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Baleendah		0	1,500,000.00
7.1.1.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	13,407,502,162.56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	12,712,329,560.56
7.1.1.2.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	13,395,502,162.56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	12,700,329,560.56
7.1.1.2.0 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6,000,000.00
7.1.1.2.0 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	6,000,000.00
7.1.1.2.0 5.	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4,640,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	4,640,800.00
7.1.1.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	4,640,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	4,640,800.00
7.1.1.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	429,468,790.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	545,531,990.00
7.1.1.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20,000,000.00
7.1.1.2.0 6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	318,778,790.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	437,301,990.00
7.1.1.2.0 6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,925,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10,000,000.00
7.1.1.2.0 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	29,250,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	29,250,000.00
7.1.1.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,000,000.00

7.1.1.2.0 6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000.00
7.1.1.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	11,515,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18,980,000.00
7.1.1.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	40,955,120.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	490,955,120.00
7.1.1.2.0 7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	36,592,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	36,592,000.00
7.1.1.2.0 7.5	Pengadaan Mebel	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4,363,120.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Mebel	Kec. Baleendah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	454,363,120.00
7.1.1.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1,179,639,240.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1,176,886,040.00
7.1.1.2.0 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88,966,215.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,717,080.00
7.1.1.2.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	1,090,873,025.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	1,037,168,960.00
7.1.1.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</i>	100%	162,045,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Baleendah	<i>Persentase BMD dalam Kondisi Baik</i>	100%	162,045,000.00
7.1.1.2.0 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	11 Unit	83,145,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baleendah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	11 Unit	83,145,000.00
7.1.1.2.0 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28,900,000.00
7.1.1.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	40,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / Pendapatan Asli Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	40,000,000.00
7.1.1.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	10,000,000.00
7.1.2..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baleendah	Nilai IKM	75 poin	211,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Baleendah	Nilai IKM	75 poin	211,200,000.00
7.1.2.0 3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	16,495,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	16,495,300.00

7.1.2.2.0 3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	16,495,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	16,495,300.00
7.1.2.2.0 4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baleendah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	194,704,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Baleendah	Persentase Urusan Pemerintahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	194,704,700.00
7.1.2.2.0 4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baleendah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Dokumen	194,704,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Dokumen	194,704,700.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	150,486,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	150,486,800.00
7.1.3.2.0 1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baleendah	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79,107,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	79,107,500.00
7.1.3.2.0 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Baleendah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	17,464,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	17,464,500.00
7.1.3.2.0 1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	61,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	61,643,000.00
7.1.3.2.0 3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Baleendah	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	41,914,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	41,914,800.00
7.1.3.2.0 3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00
7.1.3.2.0 3.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baleendah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.3.2.0 3.5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baleendah	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.3.2.0 6.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Baleendah	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	29,464,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	29,464,500.00
7.1.3.2.0 6.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Baleendah	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Baleendah		10 Keluarga	6,000,000.00

7.1.3.2.0 6.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Bersih dan Sehat	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Bersih dan Sehat	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	11,643,000.00
7.1.3.2.0 6.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	6,000,000.00
7.1.3.2.0 6.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	5,821,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Baleendah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	5,821,500.00
7.1.4..	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase penanganan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	33,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase penanganan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	33,286,000.00
7.1.4.2.0 1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	21,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	21,643,000.00
7.1.4.2.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.4.2.0 1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,000,000.00
7.1.4.2.0 2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	11,643,000.00
7.1.4.2.0 2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11,643,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Baleendah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	11,643,000.00
7.1.5..	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	100%	88,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	100%	88,286,000.00
7.1.5.2.0 1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	88,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Baleendah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	88,286,000.00

7.1.5.2.0 1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	45,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	45,000,000.00
7.1.5.2.0 1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	23,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Baleendah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	23,286,000.00
7.1.5.2.0 1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20,000,000.00
7.1.6..	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baleendah	Persentase desa yang dibangun dan diawasi	100%	47,336,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Baleendah	Persentase desa yang dibangun dan diawasi	100%	47,336,250.00
7.1.6.2.0 1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Desa yang dibangun	100%	47,336,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Persentase Desa yang dibangun	100%	47,336,250.00
7.1.6.2.0 1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00
7.1.6.2.0 1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00
7.1.6.2.0 1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	27,336,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Baleendah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	27,336,250.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,249,438,226.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,249,438,226.00
7.1.3.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,249,438,226.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,249,438,226.00
7.1.3.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33,565,747.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33,565,747.00

7.1.3.2.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	864,570,779.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	864,570,779.00
7.1.3.2.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	1,350,101,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	1,350,101,700.00
7.1.3.2.0 2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,659,903,759.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,659,903,759.00
7.1.3.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,659,903,759.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,659,903,759.00
7.1.3.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	69,713,514.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	69,713,514.00
7.1.3.2.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,581,906,653.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,581,906,653.00
7.1.3.2.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	2,007,083,592.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	2,007,083,592.00
7.1.3.2.0 2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,448,488,560.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,448,488,560.00
7.1.3.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,448,488,560.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,448,488,560.00

7.1.3.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	38,729,730.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	38,729,730.00
7.1.3.2.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,129,390,906.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1,129,390,906.00
7.1.3.2.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,279,167,924.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1,279,167,924.00
7.1.3.2.0 2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	Evaluasi Kelurahan	0 1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,306,042,827.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	3,306,042,827.00
7.1.3.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,306,042,827.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	3,306,042,827.00
7.1.3.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	61,967,568.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	61,967,568.00
7.1.3.2.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1,423,169,959.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1,423,169,959.00
7.1.3.2.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	1,819,705,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	1,819,705,300.00
7.1.3.2.0 2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah	Evaluasi Kelurahan	0 1 Laporan	1,200,000.00
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,748,128,812.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Baleendah	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,748,128,812.00

7.1.3.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,748,128,812.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Baleendah	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	2,748,128,812.00
7.1.3.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	41,311,712.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	41,311,712.00
7.1.3.2.0 2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1,390,140,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1,390,140,600.00
7.1.3.2.0 2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1,315,476,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baleendah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1,315,476,500.00
7.1.3.2.0 2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baleendah		1 Laporan	1,200,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Balendah Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan-PD).

Rencana Kerja Perubahan berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya).

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuandan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Rencana Kerja Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				8	9	10	11				12				13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		KECAMATAN BALEENDAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		UNSUR KEWILAYAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		KECAMATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	72 Point	72 Point	13.820.757.618,00	14.512.043.510,56	15.270.081.112,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	0 0 2. 1 1 0 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00							Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	KECAMATAN BALEENDAH	KECAMATAN BALEENDAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	0 0 2. 1 1 0 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	287.301.990,00	287.301.990,00	318.778.790,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	318.778.790,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	1	1	0	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	19.925.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	19.925.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
			6	0										
				3										
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	29.250.000,00	29.250.000,00	27.525.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	27.525.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0										
	1	1	0	0										
			6	0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	30.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
				4										
				5										
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	10.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0										
	1	1	0	0										
			6	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.980.000,00	18.980.000,00	11.515.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	18.980.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
				8										
				9										
					Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	40.955.120,00	40.955.120,00	40.955.120,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	46.592.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0										
	1	1	0	0										
			7	0										

7	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	132.700.000,00	132.700.000,00	132.700.000,00	KECAMATAN BALEENDAH	162.045.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	57.700.000,00	57.700.000,00	83.145.000,00	KECAMATAN BALEENDAH	83.145.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	57.700.000,00	57.700.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	83.145.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	7 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	28.900.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
2	7	0	0	2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75 Persen	75 Persen	217.050.000,00	217.050.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	226.495.300,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	7.050.000,00	7.050.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	16.495.300,00	KECAMATAN BALEENDAH

[illegible]

7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												KECAMATAN BALEENDAH	
	1	3	0	0														
			3	0														
				4														
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												KECAMATAN BALEENDAH	
	1	3	0	0														
			3	0														
				5														
7	0	0	2.	0	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												KECAMATAN BALEENDAH	
	1	3	0	0														
			6	0														
				3														
7	0	0	2.	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												KECAMATAN BALEENDAH	
	1	3	0	0														
			6	0														
				7														
7	0	0	2.	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam												KECAMATAN BALEENDAH	
	1	3	0	0														
			6	1														
				0														

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	10.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah	100 %	100 %	11.643.000,00	11.643.000,00			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	35.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
							Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	11.643.000,00	11.643.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	35.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
5	7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen	88.286.000,00	88.286.000,00				90.081.250,00	KECAMATAN BALEENDAH
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Daerah	100 %	100 %	88.286.000,00	88.286.000,00			Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	90.081.250,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7	0 1	0 5	2. 0 1			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	10.000.000,00	KECAMATAN BALEENDAH	
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										KECAMATAN BALEENDAH
		1	6	0	0											
				1	0											
					3											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	10.000.000,00		
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										KECAMATAN BALEENDAH
		1	6	0	0											
				1	0											
					9											
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	27.336.250,00	27.336.250,00	Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	30.000.000,00		
						Kelurahan Andir									30.900.104.882,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									30.900.104.882,00	
		7	0			KECAMATAN									30.900.104.882,00	
7	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	14.995.687.800,00	15.045.687.800,00	14.562.488.984,00		15.070.662.500,00	KECAMATAN BALEENDAH	
		1	3				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00	KELURAHAN ANDIR	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		14.900.201.000,00
				2.	0		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00				
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										KECAMATAN BALEENDAH
		1	3	0	0											
				2	0											
					1											

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	33.565.747,00	33.565.747,00	Kab. Bandung, Baleendah, Andir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	33.565.747,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			33.565.747,00	33.565.747,00					
	1	3	0	0	0	0										
			2	0	0	0										
						2		13 Unit	13 Unit	771.207.606,00	864.570.779,00	Kab. Bandung, Baleendah, Andir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaaan Kelurahan	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	771.207.606,00	KECAMATAN BALEENDAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			864.570.779,00	864.570.779,00					
7	0	0	2	0	0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.429.296.200,00	1.350.101.700,00	Kab. Bandung, Baleendah, Andir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.522.659.373,00	KECAMATAN BALEENDAH
	1	3	0	0	0	0										
			2	0	0	0										
						3		13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	1.522.659.373,00	1.350.101.700,00					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.429.296.200,00	1.350.101.700,00					
7	0	0	2	0	0	0	Evaluasi Kelurahan									
	1	3	0	0	0	0										
			2	0	0	0										
						4		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Andir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.200.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			1.200.000,00	1.200.000,00					
							Kelurahan Baleendah			29.202.403.668,00	30.212.678.346,00				30.900.104.882,00	
7							UNSUR KEWILAYAHAN			29.202.403.668,00	30.212.678.346,00				30.900.104.882,00	
7	0						KECAMATAN			29.202.403.668,00	30.212.678.346,00				30.900.104.882,00	
	1									14.995.687.800,00	14.562.488.984,00				15.070.662.500,00	
8	7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	15.045.687.800,00	14.562.488.984,00					
	1	3					Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									

9	7	0	0	0	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	14.995.687.800,00	15.045.687.800,00	14.562.488.984,00				15.070.662.500,00	
	7	0	0	2.	1	3	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00	14.895.201.000,00	KELURAHAN JELEKONG	-		14.900.201.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7	0	0	2.	0	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		1	3	0	0	0	0										
				2	1												
								Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarak atan	38.729.730,00	38.729.730,00	38.729.730,00	Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	38.729.730,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7	0	0	2.	0	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		1	3	0	0	0	0										
				2	2												
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.129.390.906,00	1.129.390.906,00	1.129.390.906,00	Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaa n Kelurahan	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.129.390.906,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7	0	0	2.	0	0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		1	3	0	0	0	0										
				2	3												
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1.361.591.432,00	1.361.591.432,00	1.279.167.924,00	Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaa n Kelurahan	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.361.591.432,00	KECAMATAN BALEENDAH
	7	0	0	2.	0	0	0	Evaluasi Kelurahan									
		1	3	0	0	0	0										
				2	0	0	4										

					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.336.798.205,00	1.390.140.600,00	1.390.140.600,00	Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaa n Kelurahan	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.336.798.205,00	KECAMATAN BALEENDAH
7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	1	3	0	0										
			2	0										
				3										
						16 Pokmas / Ormas	1.458.975.395,00	1.405.633.000,00	1.315.476.500,00	Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.458.975.395,00	KECAMATAN BALEENDAH
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas								
7	0	0	2	0	Evaluasi Kelurahan									
	1	3	0	0										
			2	0										
				4										
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1.200.000,00	KECAMATAN BALEENDAH
						1 Laporan								
					J U M L A H		29.202.403.668,00	29.943.689.560,56	30.212.678.346,00				30.900.104.882,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Baleendah maupun nasional. Rancangan Akhir Renja Perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai ujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Baleendah dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus

menerus diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Baleendah,
CAMAT BALEENDAH

TTD

EEF SYARIF HIDAYATULLAH

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Form E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perubahan-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Baleendah,
CAMAT BALEENDAH



EEF SYARIF HIDAYATULLAH
NIP. 19680824 199006 1 001